
**KRISIS EKONOMI NASIONAL PADA MASA-MASA AKHIR
HINDIA BELANDA 1930-1942**

Tythania G. Tairas
Jurusan Pendidikan Sejarah FIS Universitas Negeri Manado
e-mail: tythaniat@gmail.com

Article History

Received : 2021-11-08 Accepted : 2021-06-13 Published : 2021-12-27

Abstrak-Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendasari terjadinya depresi ekonomi pada masa-masa terakhir Hindia Belanda; Hubungan antara depresi ekonomi dengan semangat pergerakan Nasional; Dampak depresi ekonomi terhadap masyarakat Hindia Belanda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah menurut Marc Bloch. Hasil penelitian diperoleh faktor-faktor yang mendasari terjadinya depresi ekonomi pada masa-masa terakhir Hindia Belanda dapat dilihat pada saat krisis ekonomi dunia (*Malaise*). Harga barang ekspor menurun tajam; Hubungan antara depresi ekonomi dengan semangat pergerakan Nasional terletak pada kebijakan dan sikap Gubernur Jenderal de Jonge merupakan orang yang sangat konservatif. Dampak depresi ekonomi terhadap masyarakat Hindia Belanda 1930- 1942 adalah terjadi krisis ekonomi, para tokoh pergerakan nasional Indonesia, salah satunya yakni Soetadjo, hingga kemudian GAPI (Gabungan Politik Indonesia) mengusung “Indonesia berparlemen” dan di setujui oleh Belanda karena GAPI mengajak rakyat Indonesia dan Negeri Belanda untuk bekerjasama menghadapi fasisme. Suasana politik dunia pada masa itu semakin tegang. Dampak lain dari depresi ekonomi tersebut adalah terjadinya pertentangan kepentingan menyebabkan kondisi hidup rakyat terbelakang.

Kata Kunci : *Depresi, Ekonomi, Dasawarsa, Hindia Belanda*

***NATIONAL ECONOMIC CRISIS IN THE END TIMES
DUTCH INDIA 1930-1942***

Tythania G. Tairas

Department of History Education, Faculty of Social Sciences, Manado State University

e-mail: tythaniat@gmail.com

Abstract- This study aims to explain the factors that underlie the economic depression in the last days of the Dutch East Indies; The relationship between the economic depression and the spirit of the National movement; The impact of the economic depression on the people of the Dutch East Indies. The method used in this research is the historical method according to Marc Bloch. The results showed that the factors underlying the economic depression in the last days of the Dutch East Indies could be seen during the world economic crisis (Malaise). Prices of export goods fell sharply; The relationship between the economic depression and the spirit of the National movement lies in the policies and attitude of Governor General de Jonge, who is a very conservative person. The impact of the economic depression on the people of the Dutch East Indies from 1930 to 1942 was an economic crisis, the leaders of the Indonesian national movement, one of

them was Soetadrjo, until then GAPI (Indonesian Political Association) promoted "Indonesia in parliament" and was approved by the Dutch because GAPI invited the Indonesian people and The Netherlands to cooperate against fascism. The world political atmosphere at that time became increasingly tense. Another impact of the economic depression is the occurrence of conflicts of interest causing the living conditions of the people to be backward.

Keywords: *The Depression, the Economy, the Decade, the Dutch East Indies*

Pendahuluan

Hindia Belanda yang bahasa Belanda disebut *Nederlands(ch)-Indië* dalam tulisan ini adalah sebuah wilayah koloni Belanda yang diakui secara *de jure* dan *de facto*. Kepala negara Hindia Belanda adalah Ratu atau Raja Belanda dengan seorang Gubernur-Jendral sebagai perwakilannya yang berkuasa penuh. Hindia Belanda juga merupakan wilayah yang tertulis dalam Undang-undang Kerajaan Belanda tahun 1814 sebagai wilayah berdaulat Kerajaan Belanda, diamandemen tahun 1848, 1872, dan 1922 menurut perkembangan wilayah Hindia Belanda.

Dalam kaitan itu, pada dasarwasa ketiga ditandai oleh suatu perkebunan yang pesat sekali dalam bidang perusahaan, khususnya perusahaan perkebunan. Hasilnya tidak ada taranya dalam sejarah Indonesia, boleh dikata meningkat sekali sehingga mendorong ekspor serta menarik modal dari pelbagai negara, antara lain Amerika dan Jepang. Tepatlah apabila dikatakan bahwa Indonesia terbuka lebar bagi lalu-lintas dunia. Perkembangan ini membawa berbagai akibat dalam bidang politik dan sosial. Dalam lapangan sosial terasa ada keperluan mendesak untuk mengatur perburuhan dan melindungi hak-hak kaum buruh, serta menetapkan upah yang pantas. Perhatian internasional terhadap masalah perubahan di Indonesia memaksa penguasa kolonial memenuhi dasar-dasar kemanusiaan dalam menciptakan peraturan-peraturan bagi kaum buruh.

Berbagai segi kehidupan yang masih terbelakang seperti soal pendidikan, kesehatan, dan ikatan hutang-piutang dari rakyat perlu ditingkatkan. Pelbagai kegiatan ini berjalan sejajar dengan kemajuan dalam perusahaan dan perdagangan yang menciptakan suatu derajat kemakmuran, meskipun terutama hanya dapat dinikmati oleh lapisan atas dari masyarakat kolonial.

Hal ini pada satu pihak menimbulkan kepercayaan pada penguasa koloni di Hindia Belanda bahwa negeri ini dapat melaksanakan sendiri pemerintahan serta pembangunannya, pada pihak lain meningkat ketegangan antara pihak majikan serta penguasa dengan pihak kaum buruh serta rakyat kecil pada umumnya. Semakin menyolok perbedaan serta jurang tingkat kehidupan antara kedua golongan itu. Kegelisahan sosial selama puluhan tahun itu mencerminkan ketegangan yang ada di belakang kesejahteraan serta kemakmuran itu. Pemogokan-pemogokan dan agitasi-agitasi yang memuncak pada pemberontakan tahun 1926 dan 1927 merupakan Hindia Belanda membawa akibat meruncingnya perhubungan yang tidak seimbang atau selaras antara pengusaha dan yang diperintah.

Perkembangan proses produksi yang sangat cepat dengan hasil yang bertambah besar serta upah yang sangat rendah, memerlukan penyesuaian tidak hanya terdapat evolusi dari dunia luar Hindia Belanda tetapi juga terhadap hak-hak azasi dari penduduk pribumi. Pemerintah kolonial terlalu didasarkan atas kekuasaan dan kurang memperhatikan kepamongannya. Kepentingan rakyat di sini terlalu diabaikan, politik terlalu ditentukan oleh pihak sana serta terlalu terarah kepada kepentingan dan menurut ukuran barat.

Derajat progresifitas atau kalau dikehendaki sifat reaksioner politik kolonial dapat diukur dari reaksinya terhadap pelbagai tuntutan itu garis-garis warna kulit yang memisahkan kedua golongan bertambah tajam dan perasaan kaum pribumi yang dibedakan serta dibelakang kepentingannya menjadi dasar kokoh dari kehidupan kolonialisme meskipun diperhambat oleh jaman “melese” (Malaise) dan tindakan menekan oleh pemerintah, nasionalisme tumbuh terus dengan tidak tertahan lagi serta lebih sadar akan tujuannya. Dialog antara kaum

nasionalis dengan pemerintah kolonial mencerminkan politik kolonial yang sangat konservatif dan reaksioner .

Hal ini jelas sekali dari kebijaksanaan yang diambil dari oleh Gubernur Jenderal de Jonge (1931-1936) yang membuka halaman baru dalam politik kolonial pada awal tahun tiga puluhan. Politikanya bersifat sangat reaksioner terhadap pergerakan nasional, yang ternyata sama sekali tidak dipahami arti dan hakekatnya dan tidak hendak diakui eksistensinya beberapa peraturan mengenai larangan berkumpul dan berapat, hukuman bagi pegawai yang menggabungkan diri pada kegiatan. “ekstremistis”, hak-hak membuang dan meghinternir terhadap kaum nasionalis radikal, kesemuanya selaras dengan politik kekerasan yang menunjukkan kekurangan pengertiannya akan nasionalisme , dan pada pihak lain terutama kepentingan kaum pengusaha yang perlu dibela dan dipertahankan selama masa krisis itu peningkatan pergerakan nasional menjadi dasar politik menindas de Jonge; selama pemerintahannya banyak menerapkan hak-hak *exorbitant* dengan menginternir Ir. Soekarno ke flores dan kemudian ke Bengkulu, Drs. Mohamat Hatta dan Sjahrir ke Digul atas dan kemudian ke banda belum lagi berpuluh-puluh yang terlibat dalam pemberotakan tahun 1926 dan 1927 serta aktivis radikal pada tahun-tahun berikutnya ke Digul atas, atau terkenal juga sebagai tanah merah. kecuali kaum komunis, juga anggota-anggota partai nasional radikal seperti PNI, Partindo dan Permi dideportasikan ke sana.

Politik menindas juga diterapkan terhadap partai-partai yang bersikap nonkoperatif seperti PNI dan Partindo yang berturut-turut di bubarkan. Dengan demikian aksi politik praktis tidak mungkin di jalankan dan menjadi lumpuh sama sekali, meskipun tidak padam terutama golongan nonkoperatif

sangat menderita akibat politik penindasan dan mulai mencari taktik koperasi.

Pada awal tahun 1933 banyak rapat-rapat dibubarkan karena ucapan-ucapan yang dipandang oleh polisi sebagai hasutan untuk memberontak, antara lain di Surabaya, Puwerejo, Probolinggo, Cilacap, Kebumen, dan sebagainya. Pembubaran rapat seperti itu mempunyai akibat yang menguntungkan partai radikal, seperti Partindo, karena mendapat propaganda yang baik. Kenyataannya ialah ‘bahwa banyak yang menggabungkan diri kepada partai itu. Tidak mengherankan apabila pada tanggal 27 Juni 1933 keputusannya Gubernur menentukan larangan bagi pegawai negeri untuk menjadi anggota partai itu. Tindakan kemudian mempunyai sasarannya pemimpin-pemimpin, yang satu persatu ditangkap, Ir. Soekarno pada 1 Agustus 1930 kemudian pada 25 Februari 1934, Moh. Hatta, Sjahrir, Maskoen, Boerhanoeddin, dan lain-lainnya. Sementara itu terus menerus dilakukan *gropyokan* (penyerbuan) terhadap pertemuan-pertemuan atau tokoh-tokoh pergerakan, penggeledahan, kesemuanya sesuai dengan politik Colijn dan de Jonge yang hendak menghancurkan partai-partai radikal. Politik keras ini dapat dikatakan berhasil dalam arti bahwa partai kehilangan anggota dan kontaknya dengan rakyat. Untuk menghindari kebinasaan maka diperlukan reorientasi dalam strategi dan taktik perjuangan.

Bagaimana sikap dan politik pemerintah kolonial terhadap perkembangan ini? Apabila sejak awal tahun duapuluhan tahun diproklamasikan cita-cita kemerdekaan Indonesia oleh Perhimpunan Indonesia, pada pertengahan tahun tigapuluhan cita-cita itu hendak diwujudkan dalam perjuangan politik di gelanggang Dewan Rakyat. Petisi Soetardjo mengusulkan suatu konferensi antara wakil-wakil Indonesia dan Nderland untuk merencanakan perubahan-perubahan yang

dalam sepuluh tahun dapat memberi status merdeka kepada Indonesia. Sebagian besar dari partai-partai, golongan-golongan dan tokoh-tokoh pergerakan mendukung petisi ini dan melancarkan pelbagai aksi. Seluruh perhatian pergerakan dipusatkan pada petisi ini.

Meskipun petisi ini bunyinya tidak revolusioner, tetapi pihak Belanda membuat reaksi yang menunjukkan sikapnya yang konservatif. Dianggapnya usul ini terlalu pagi dan diajukan tidak ada saat yang tepat; lagi pula waktu sepuluh tahun dianggap terlalu pendek. Reaksi dari penguasa kolonial menunjukkan dan didukung oleh keinginan rakyat yang berjumlah 65 juta jiwa. Otonomi hanya dapat dirrealisasikan secara lambat laun dan dari lembaga-lembaga bawah ke atas.

Walaupun usul itu ditolak mentah-mentah, namun politik kolonial mulai melaksanakan perubahan pemerintahan pada tahun 1938, berdasarkan atas rencana tahun 1922 dan sebagai kelanjutan dari Undang-undang Desentralisasi tahun 1903. Pemerintah membentuk provinsi-provinsi di luar Jawa dengan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sedang Dewan Provinsi yang mengatur rumah tangga daerah.

Di sini gagasan Colijn yang konservatif tampak dengan jelasnya, yaitu pendirian pemerintahan pulau-pulau dan dewan-dewan lokal perlu mengoper fungsi dewan Rakyat. Dasar dari politik ini ialah pembentukan suatu federasi. Bagaiman pun juga bentuk pemerintah yang disusunnya, kekuasaan Belanda dalam soal-soal kedaerahan masih tetap dipertahankan. Bagi pengusaha kolonial keinginan hidup dalam ikatan kolonial dengan Belanda dianggap suatu kenyataan yang tidak perlu diragukan. Suatu akibat yang tampak jelas ialah bahwa penolakan petisi semakin menjauhkan kedua golongan-penguasa dan yang diperintah. Dirasakan oleh umum bahwa suatu

permintaan yang sederhana pun telah ditolak mentah-mentah, suatu bukti dari pandangan serta pendirian Belanda yang picik serta sempit. Tiada lain jalan bagi kaum pergerakan untuk memperkuat barisan dengan memperkuat organisasi dan persatuan bangsa. Usaha ke arah persatuan ini juga didorong oleh keadaan internasional yang sejak tahun 1939 menjadi gawat dengan ekspansi Nasional Sosialisme Jerman.

GAPI sebagai penjelmaan gerakan kesatuan itu didasarkan atas hak menentukan nasib sendiri, kesatuan nasional, demokrasi dan kesatuan aksi. Baiklah kita ikuti bagaimana reaksi Belanda terkesatuan perjuangan GAPI ini, sehingga dapat kita ketahui corak politik kolonial pada tahun-tahun terakhir dari eksistensi penguasa kolonial. Semboyan yang didengungkan ialah "Indonesia Berparlemen" suatu tujuan yang menghendaki kerjasama erat antara Belanda dan Indonesia, terutama diperlukan atas desakan keadaan internasional yang mengancam kedua negeri itu. Seperti halnya dengan Petisi Soetardjo aksi ini mendapat dukungan luas di kalangan masyarakat. Tujuan yang jelas perumusannya serta yang mempersatukan, memperkuat barisan perjuangan nasional.

Uluran tangan dari pihak Indonesia ini terutama ditafsirkan oleh Belanda sebagai suatu *chantage*, yaitu menggunakan keadaan baru keluar pada tanggal 10 Februari 1940 yang menyatakan bahwa perkembangan dalam jasmani dan rohani akan memerlukan perubahan dalam bidang ketatanegaraan. Memerlukan tanggung jawab dari para pemimpin. Tanggung jawab ini hanya dapat dipikul apabila rakyat telah memahami kebijaksanaan politik. Selama pemerintah Belanda yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan politik di Hindia Belanda, tidak mungkin didirikan Parlemen Indonesia yang mengambil alih tanggung jawab itu.

Kesimpulan dari pihak dan pemimpin Indonesia tentang penolakan itu ialah bahwa akan menjadi daerah jajahan untuk selama-lamanya. Jalan lain yang perlu ditempuhnya ialah melancarkan propaganda seluas-luasnya di kalangan rakyat untuk melaksanakan cita-cita negara keasatuan Indonesia yang didasarkan atas demokrasi dan sistem parlementer dengan pemilihan umumnya. Pendudukan negeri Belanda oleh Jerman tidak mempengaruhi pendirian pemerintahannya yang tidak mau mundur setapakpun jua. Yang sangat menarik perhatian ialah bahwa sikap konservatif itu tidak mengurangi loyalitas bangsa Indonesia terhadap negeri Belanda bahkan ada keinginan umum untuk kerjasama dalam menghadapi perang itu. Sebagai sikap yang mendukung usaha Belanda ialah bahwa pelbagai aksi politik dihentikan.

Sebagai imbalan dari kesetiaan bangsa Indonesia diutarakan oleh Gubernur Jenderal Tjarda bahwa masyarakat dalam pelbagai seginya mengalami perubahan, gagasan-gagasan mengenai perubahan sosial dan politik perlu disimpan dahulu sampai sesudah perang sehingga dapat dikaji lagi dan disesuaikan serta menjadi lebih jelas lagi. Keterangan tidak jelas ini hanya menimbulkan kekecewaan saja, serta membuat rakyat semakin skeptis dan ragu-ragu akan pelbagai usaha dari Belanda yang diajukan kemudian. Maksud Belanda terhadap pergerakan Nasional semakin jelas dengan tindakannya seperti pemberangusan pers, pengawasan lebih keras terhadap rapat-rapat sehingga tepatlah apabila dikatakan bahwa pada akhir tahun 1940 Hindia Belanda sudah menjadi negara polisi.

Sementara itu perjuangan di lingkungan Dewan Rakyat terus berlangsung. Tiga mosi diajukan yaitu mosi Thamrin, mosi Soetardjo dan mosi Wiwoho. Menanggapi mosi pertama, pemerintah bersedia meniadakan istilah "Inlander" dan

menggantikannya dengan "Indonesier" atau "Inheems", akan tetapi berkeberatan untuk menggantikan "Nederland-indie" dengan "Indonesia". Mosi kedua mengusulkan untuk meniadakan segala diskriminasi berdasarkan kriterium ras bagi penghuni Hindia Belanda dan membentuk satu kewarganegaraan bagi semua lapisan sosial. Tanggapan Pemerintah tidak lain dari pada penundaan pemecahan persoalan sampai sesudah perang. Mosi Wiwoho mengungkap kembali soal perluasan struktur ketatanegaraan Hindia Belanda yang memerlukan pembentukan Dewan Negara, perluasan kekuasaan Dewan rakyat dan tanggung jawab kepala Departemen terhadap dewan itu.

Satu-satunya hasil yang nyata dari mosi-mosi itu ialah pembentukan suatu panitia pada bulan Maret 1941, terkenal sebagai *Commisie-Visman*, yang bertugas meneliti keinginan, cita-cita serta pendapat yang ada pada pelbagai golongan dan bangsa, lapisan dalam lapangan perkembangan tata-negara serta kedudukan pelbagai kelompok penduduk di dalam susunan itu.

Panitia ini tidak dianggap "sungguh-sungguh" dan dipandang hanya sebagai cara mengelakkan perhatian rakyat. Hasilnya diumumkan pada bulan desember 1941 dan karena kancah perang pasifik sudah sangat dekat, tidak ada pengaruhnya terhadap perkembangan politik. Pendirian serta pandangan yang menjiwai laporan itu sangat subyektif dan dari titik penderian bersifat kolonial yang menyatakan bahwa "penduduk sangat puas dengan pemerintahan Belanda".

Pemerintahan sendiri menyatakan pada akhir tahun 1940 bahwa setiap pembicaraan tentang kemerdekaan Indonesia perlu ditolak, karena membuat perkembangan ketatanegaraan yang demokratis berubah menjadi perjuangan kekuasaan. Soal inipun ditunda sampai perang selesai. Hal ini serasi dengan pendapat menteri jajahan, Welter,

yang pada 1 April 1941 menyatakan bahwa selama rakyat Belanda tidak dapat memberikan suaranya, perubahan-perubahan tidak bersifat demokratis.

Kesediaan untuk mempertimbangkan suatu penyesuaian ketatanegaraan Belanda terhadap keadaan yang berubah serta menentukan struktur dan kedudukan daerah seberang dalam kerajaan diucapkan secara resmi oleh Ratu Wilhelmina pada 10 Mei 1941 dalam suatu pidato radio. Dalam kenyataan suatu konferensi untuk membicarakan masalah itu perlu ditunda juga sampai sesudah perang.

Sampai pada saat-saat terakhir dari pemerintahan kolonial Belanda semua usul pihak Indonesia baik untuk memberi status merdeka kepada Indonesia maupun ajakan kerjasama dalam menanggulangi bahaya perang tetap ditanggapi dengan menjalankan politik menunda, yaitu menunggu sampai perang selesai. Endirian ini tetap dipertahankan juga dalam menghadapi Piagam Atlantik yang menjamin hak setiap bangsa untuk memilih bentuk pemerintahannya sendiri.

Usul tentang milisi pribumi yang berdasarkan kewajiban setiap warganegara mempertahankan negerinya, dialekan dengan alasan bahwa suatu perang modern lebih memerlukan angkatan perang yang terdiri atas prajurit profesional. Hanya karena suatu penghematan milisi sebesar lima atau enam ribu orang dapat dilakukan. Tidak dapat disangka bahwa milisi ini dikhawatirkan oleh Belanda sebagai alasan bagi bangsa Indonesia untuk menuntut hak-hak politik yang lebih besar, seperti perubahan ketatanegaraan. Memang Belanda ternyata hanya menyetujui milisi pribumi secara terbatas dan tidak disertai oleh pemberian hak-hak ketatanegaraan kepada rakyat.

Suasana pada bulan-bulan trakhir jaman Hindia Belanda diliputi ole perasaan apatis bercampur tidak percaya dan akhirnya menjadi anti-Belanda. Politik menunda dan memberi janji-janji merusak kepercayaan terhadap maksud-maksud Belanda. Tujuan untuk bekerjasama dengan dasar hak yang sama ditolak sebagai *chantage* politik, setiap keinginan dianggap sepi dan semua usul-usul ditolak mentah-mentah.

Sampai saat terakhir sifat-sifat pokok kolonial yang konservatif dipertahankan, yaitu masyarakat yang diberi ciri dualitas, di mana kedudukan golongan penguasa kolonial ciri dualitas, di mana kedudukan golongan penguasa kolonial tetap terjamin sedang golongan yang diperintah tetap dibatasi hak-hak dan diperlukan sebagai bangsa yang belum masak untuk berdiri sendiri. Ditinjau dari pandangan historis dewasa ini jelaslah bahwa politik itu tetap dipertahankan dan tidak banyak terlihat perubahan sikap ataupun pendirian sesudah perang. Hanay perjuangan bangsa Indonesia sendiri dalam revolusi sajalah yang akhirnya dapat mendatangkan kemerdekaan baginya.

Seluruh proses perkembangan ekspansi kolonial Belanda di Indonesia memberi gambaran bagaimana kolonial ditanam dalam masyarakat Indonesia serta terciptanya hubungan kolonial yang tidak hanya terbatas pada hubungan ekonomis dan politik. Telah ditonjolkan peranan ideologi yang dipakai untuk membenarkan kolonialisme, sistemnya administrasi yang menjamin ketentraman dan ketertiban agar keuntungan ekonomis untuk negeri induk dapat mengalir terus. Politik kolonial yang dituangkan sebagai proses pasifikasi, organisasi dan perkembangan daerah-daerah sampai akhir jaman Hindia Belanda tetap dijiwai oleh kepentingan-kepentingan negeri induk sehingga hubungan antara negeri induk itu dengan daerah jajahan sering disamakan

dengan hubungan antara modal dan tenaga kerja.

Keperluan untuk mempertahankan dominasi kolonial itu memaksa penguasa kolonial kecuali mempergunakan kekuatan, juga menyusun cara-cara membenarkan situasi itu dengan ideologi-ideologi sebagaimana dibentengkan di atas, seperti ide asosiasi, politik etis, politik sintese atau negara Neerland-Raya. Situasi kolonial hendak dipertahankan dengan diskriminasi rasial dan non-akulturatif.

“Garis warna” terdapat dalam setiap masyarakat kolonial, yang memisahkan kaum kulit putih dari massa yang berwarna. Seluruh struktur ekonomi, sosial dan politik didasarkan atas prinsip itu, semua hubungan bersifat hubungan antara atasan dan bawahan, atau antara superioritas dan inferioritas. Dalam stratifikasi sosialnya kaum penjajah ada di lapisan atas dan yang dijajah di lapisan bawah, dan garis pemisahannya sering sedemikian sehingga menyerupai sistem kasta. Hal ini didasarkan atas konsep superioritas ras dari kaum kulit putih. Dibanding dengan regime kolonial Inggris, di Indonesia garis warna kurang keras. Belanda lebih liberal dalam sikapnya terhadap sistem kasta, meskipun hubungan sosial tetap tidak bebas dan antara lain terbukti dari adanya perkawinan antar-bangsa, keturunannya diasimilasikan dalam golongan kaum kulit putih.

Kontrol ekonomis dan politik dipegang erat-erat oleh Belanda, baru mulai ada perhatian terhadap kemakmuran rakyat pada awal abad XX, sebelumnya hanya mementingkan tenaga kerja yang murah, penyerahan hasil bumi yang wajib, sehingga status ekonomi dan politik bangsa Indonesia sangat rendah; perdagangan dan ekonomi menjadi monopoli Belanda. Dalam bidang politik dicapai sedikit kemajuan dengan adanya perwakilan-perwakilan, meskipun

terbatas pada perundang-undangan dan masih dibatasi oleh hak veto pemerintah pusat. Lagi pula ada jaminan bahwa suara terbanyak masih pro-Belanda.

Akibat dari politik non-akulturatif itu ialah bahwa proses westernisasi sangat terhambat, pendidikan terbatas, proses emansipasi sangat lambat, sangat kurang latihan keterampilan teknik, sangat perlahan-lahan perkembangan ke arah kemerdekaan politik. Keuntungannya ialah bahwa banyak lembaga tradisional yang utuh dan erosi kultural tidak sederas daerah-daerah yang mengalami asimilasi dengan kekuasaan kolonial.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian dan analisis data penelitian ini adalah metode sejarah menurut Marc Bloch. Empat tahap yang dilakukan dalam metode ini, yakni : *pertama*, melakukan observasi historis tentang depresi ekonomi pada masa-masa akhir hindia belanda (1930 – 1942); *kedua*, melakukan kritik sejarah atau pengujian data tentang depresi ekonomi pada masa-masa akhir hindia belanda (1930 – 1942); *ketiga*, melakukan generalisasi dan atau kategorisasi data sesuai permasalahan dalam penelitian ini, yaitu depresi ekonomi pada masa-masa akhir hindia belanda (1930 – 1942); dan *keempat*, melakukan pencarian (analisis) sebab-akibat dari masalah yang ditulis, yakni berkaitan dengan depresi ekonomi pada masa-masa akhir hindia belanda (1930 – 1942).

Hasil dan Pembahasan

Hampir sepanjang tiga dasawarsa pertama abad ke-20 ekonomi dunia tumbuh pesat. Optimisme sangat besar juga di

Indonesia (Hindia Belanda pada masa itu). Tetapi ternyata krisis datang dengan tiba-tiba menjelang akhir 1929, dan akan berlangsung selama bertahun-tahun. Biarpun sejak 1937 pada perbaikan namun sebenarnya baru Perang Dunia II yang mengakhiri zaman depresi.

Krisis ekonomi dunia pada tahun 1930-an membawa pengaruh buruk terhadap kondisi ekonomi dan politik di Hindia Belanda. Tidak berfungsinya perbankan, pabrik-pabrik atau industri menyebabkan terjadinya pemecatan buruh besar-besaran. Dampaknya pengangguran besar-besaran pun terjadi dan eksploitasi pemerintah terhadap kolonial belanda semakin memberatkan. Hal ini memicu kaum pergerakan semakin intensif melakukan koordinasi.

Dalam bidang politik, Pemerintah Kolonial juga melakukan kebijakan yang sangat reaksioner terhadap dunia pergerakan nasional. Terutama Gubernur Jenderal de Jonge yang saat itu bertindak tegas dan keras terhadap kaum pergerakan. Dia memberlakukan pengawasan ketat terhadap rapat-rapat umum, melakukan penangkapan dan pemenjaraan terhadap sejumlah aktivis, hingga melarang kegiatan pers. Seakan pergerakan nasional telah mati suri pada masa krisis ekonomi.

Lalu apa yang menjadi motif Pemerintah Kolonial menjalankan politik reaksioner terhadap kaum pergerakan nasional pada saat krisis ekonomi tengah melanda. Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji mengenai apakah krisis ekonomi dapat mempengaruhi kebijakan Pemerintah Kolonial dalam menyikapi kaum pergerakan.

Sejak mula, perkebunan Indonesia, sebagai penghasil ekspor, sangat sensitif terhadap naik turunnya pasaran dunia. Dalam abad ke-19 hasil ekspor yang terbesar adalah gula dan kopi, khususnya dari Jawa. Gula,

kata orang, adalah laut tempat Pulau Jawa mengapung. Dialah soko guru kemakmuran ekonominya. Tetapi dalam abad ke-20, dengan saingan dari Brazil, yang menanam kopi, dan Filipina dan Kuba yang mengembangkan perkebunan gula, serta dimajukannya pembuatan gula biet di Eropa, arti gula sebagai bahan ekspor merosot. Ekspor gula ini kemudian jatuh sama sekali dan hilang artinya sebagai hasil ekspor Indonesia, khususnya Jawa. Pun setelah depresi berakhir, gula ini tidak dapat mengembalikan kedudukannya lagi seperti sebelum 1929.

Dengan singkat akibat krisis ekonomi di dunia, habis juga peran gula sebagai bahan ekspor dari Indonesia -- sampai kini. Depresi panjang akhirnya mengubah ekspor perkebunan Indonesia yang berasal dari abad ke-19. Dengan sendirinya struktur ekonomi ikut berubah. Pulau Jawa, sebagai penghasil bahan ekspor seperti gula, kopi dan teh, tidak berarti lagi dalam perdagangan dunia. Gula dan kopi, yang sebelum 1929 merupakan 50% dari ekspor Indonesia, pada tahun 1940 hanya merupakan 7%-nya. Penghasil ekspor kemudian adalah daerah di luar Jawa, dengan segala akibat bagi penghasilan penduduk masing-masing daerah.

Dalam abad ke-20 ada suatu hasil ekspor baru yang berkembang di Indonesia, yakni karet dan minyak. Dengan majunya industri mobil, kedua bahan ini jadi sangat penting. Permintaan akan karet dan minyak demikian meloncat, sehingga selain perkebunan dengan investasi besar, berkembang pula karet rakyat di luar Jawa. Tapi harga karet jatuh. Dari f. 54 dalam tahun 1929 untuk satu sheet menjadi 30 1/2 sen di tahun berikutnya. Dalam tahun 1931 ia malah jadi 15 sen, bahkan sampai pada 8 1/2 sen dalam tahun 1932. Baru dalam tahun 1933 ia naik lagi menjadi 11 sen, dan naik lagi karena persiapan Perang Dunia II. Reaksi pertama

dari karet rakyat ketika harga-harga jatuh adalah memperbesar produksi. Mereka ingin mendapatkan jumlah uang yang sama seperti sebelum krisis. Tapi hal ini lebih menjatuhkan harga karet lagi. Akhirnya pemerintah campur tangan. Baik mengenai gula maupun karet diadakan perjanjian internasional dengan negara lain Hasilnya setiap negara mendapat kuota tertentu dari pasaran gula atau karet. Setiap perkebunan mendapat bagian dari kuota ini.

Bagaimana sekarang dengan karet rakyat? Pada permulaan pemerintah Hindia Belanda merasa terlalu sukar untuk memberikan kuota pada setiap pengusaha karet rakyat. Maka semacam pajak penjualan atas karet rakyat dikenakan, dengan tujuan akan membatasi produksi. Pajak itu, juga dimaksudkan sebagai penambah penghasilan negara. Tapi dari permulaan, pajak atas karet rakyat ini menghadapi kesukaran yang luar biasa. Maka beberapa waktu sesudahnya setiap pengusaha karet rakyat diberi kuota penghasilan karet, kecuali di Bengkalis. Di daerah ini, karena luasnya daerah pohon karet rakyat tetap dikenakan pajak penjualan. Akhirnya di daerah itu pajak tidak bisa dibayar, sedangkan penghasilan dari karet rakyat sama sekali terhenti. Berarti tidak ada daya beli pada rakyat. Ini menimbulkan penyerbuan dan perampokan terhadap gudang beras dan toko-toko di daerah Bengkalis.

Peristiwa itu hanya satu ilustrasi. Dengan penciptaan tanah perkebunan, dan ditutupnya pabrik gula, karet, dll. maka sebagian besar penghasilan uang tunai penduduk hilang. Di lain pihak kewajiban mereka masih tetap tinggi. Pajak belum disesuaikan dengan kondisi depresi ekonomi. Karena banyak petani tidak dapat membayar pajak tanah, maka tanah mereka diserahkan kembali pada lurah dan negara. Beberapa tuan tanah kecil mungkin justru timbul pada masa itu. Di beberapa tempat lain, seperti di

Sumatera, pajak uang pada para sultan terpaksa direndahkan.

Kurangnya daya beli masyarakat tentu berakibat pada industri rakyat atau pertukangan rakyat. Satu demi satu perusahaan bangkrut. Industri batik umpamanya direduksi menjadi 1/3 dari sebelum 1929. Pemerintah Hindia Belanda memang memberikan berbagai subsidi, baik pada perusahaan Barat maupun pribumi, dan semacam industrialisasi mulai berkembang. Tapi industrialisasi ini sayangnya lebih menekankan pada modal, sehingga tidak memberikan demikian banyak pekerjaan pada penduduk. Terhadap penduduk sendiri pemerintah kadang sampai harus campur tangan untuk menghindari timbulnya kelaparan, yang timbul bukan karena kekurangan beras tetapi karena lemahnya daya beli. Di Indramayu (Cirebon) misalnya, pemerintah terpaksa mendistribusikan beras. Pembelian beras yang dibeli oleh pemerintah untuk memberikan penghasilan pada penduduk. Keuangan negara dalam zaman depresi akhirnya yang paling sulit. Jatuhnya ekspor mengakibatkan diturunkannya impor, sedangkan sebagian besar penghasilan negara adalah dari dua sumber ini. Selain itu pajak sukar masuk karena kurangnya penghasilan.

Dengan singkat defisit pada anggaran pemerintah Hindia Belanda selama zaman depresi menaik dan pemerintah hanya berpolitik untuk sebanyak mungkin memperoleh anggaran yang seimbang. Balans ini menyebabkan dipotongnya pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat. Bahkan anggaran kesehatan rakyat dipotong sampai hanya tinggal 1/6 dari sebelum krisis ekonomi. Padahal sejak 1900 pemerintah Hindia Belanda melancarkan apa yang disebut politik etis: melalui irigasi, edukasi dan transmigrasi ia ingin menaikkan taraf hidup rakyat semua dan membawanya ke abad modern.

Dalam krisis ekonomi, program ini harus ditiadakan atau diperkecil sampai tidak berarti lagi. Pada akhirnya negara kolonial jadi kelihatan tak berguna. Ia tidak dapat membawa masyarakat ke abad modern dan harus mengingkari janji-janji politik etisnya. Bagaimana akibatnya, belum ada penelitian yang mendalam. Namun sangat menarik di masa ini muncul sarjana ekonomi Belanda, H.J. Boeke, yang mengatakan bahwa kebudayaan Timur tidak memungkinkan orang bisa mengatasi kemiskinan dunia Timur. Jadi bukan salah Barat kalau Timur itu miskin, sebab struktur kebudayaannya adalah demikian rupa. Secara kasar demikianlah teori Boeke: seolah-olah suatu pemberian dalih, ketika Belanda seperti mau cuci tangan dari tanggung jawab kolonialnya.

Perkembangan ekonomi dunia memasuki dekade 1930-an dikejutkan dengan munculnya krisis yang berawal di pasar Bursa New York, Amerika Serikat. Spekulasi para pialang dalam perdagangan saham di bursa *Wall Street* menyebabkan jatuhnya indeks kumulatif yang menyeret harga saham menurun tajam. Kejatuhan perekonomian Amerika Serikat itu mempengaruhi perkenomian internasional. Perdagangan dunia menjadi lesu yang memukul Negara-negara produsen, terutama komoditas pertanian dan perkebunan.

Namun kerajaan Belanda dan Hindia Belanda masih mempertahankan standar emas dan tidak mendevalusi guldenya. Akibat politik moneter ini sangat luas dan menyeret perekonomian Indonesia ke dalam penderitaan selama beberapa tahun. Tindakan yang dijalani pemerintah kolonial adalah seperti menurunkan gaji dan upah, mengadakan pajak-pajak baru dan menurunkan berbagai tarif dan lainnya. Politik deflasi ini dapat dijalankan karena di jajahan tidak ada serikat buruh. Ekonomi perdesaan juga terkena depresi dengan menurunnya harga hasil bumi,

ketela, jagung dan padi. Sedangkan harga komoditas praktis tidak turun. Masyarakat menderita kerugian karena berkurangnya sewa tanah, upah buruh dan pembayaran beberapa pelayanan.

Gambaran Hindia Belanda menjelang *Malaise* adalah suatu perekonomian yang kompleks bertujuan memperbesar jumlah ekspor hasil-hasil pertanian dan pemenuhan kebutuhan material masyarakat daerah perdesaan ala kadarnya. Kesulitan yang dialami Hindia Belanda dalam melakukan ekspor saat depresi adalah kesulitan mencari pasar dan malah muncul pesaing-pesaing Negara ekspor baru. Seperti yang dialami ekspor gula, teh, tembakau dan nila. Selain itu ketersediaan bahan makanan untuk per kapita menurun dari tahun 1930 hingga tahun 1934. Sungguh tidak diragukan lagi bahwa kesejahteraan Indonesia menurun.

Krisis ekonomi dunia begitu keras menghantam Hindia Belanda karena pada saat itu ekonomi Hindia-Belanda sangat bergantung kepada ekspor, khususnya ke pasar eropa. Industri yang berkembang di Hindia-belanda, umumnya adalah perkebunan, sangat bergantung pada pasar eropa itu. Maka, ketika pasar eropa merosot, maka industri di Hindia-belanda juga turut merosot: Harga gula jatuh sampai 22 % daripada harga tahun 1925; getah sampai 10 %; kopra sampai 18% ,teh 50% dan kopi 27 %. Rata-rata harga barang penghasil tanah-tanah jajahan jatuh di pasar Eropa sampai lebih kurang 31%.

Dari tahun 1929 hingga 1930, rata-rata harga barang ekspor Hindia Belanda menurun sebesar 28%. Tahun berikutnya harga kembali turun sebesar 25% yang disusul kejatuhan berturut-turut sebesar 21% dan 11%. Pada tahun 1933 harga itu menjadi 35% dari keadaan tahu 1929 dan kurang dari 31% terhadap harga rata-rata masa 1923-1927 . Volume ekspor yang dihitung dalam satuan

ton, pada tahun 1931-1933 merosot hingga tidak lebih dari 17% menurut jumlah 1929. Akibatnya, tampak pada pendapatan rata-rata. Selama 5 tahun pertama 1930-an, pendapatan ekspor tinggal 37% dari pendapatan rata-rata ekspor selama 5 tahun bagian kedua masa 1920-an. Angka pendapatan di tahun 1935 adalah kurang dari setengah yang diperoleh dari satu decade sebelumnya.

Kebijakan Hindia Belanda adalah perdagangan bebas, standar emas, anggaran berimbang dan persaingan terbuka. Pada 1930-1936 pemerintah Hindia Belanda selalu defisit dalam neraca keuangan sehingga harus berhutang, yang bertambah besar jumlahnya. Keadaan itu menyebabkan pengambilan kebijakan untuk pengurangan tenaga pegawai, gaji dikurangi, penghentian penambahan pegawai di Eropa, pensiun lebih awal, pengurangan biaya pengeluaran belanja pemerintah dan penenaan cukai tambahan untuk menambah kas Negara kolonial. Kesemuanya merupakan akibat politik ekonomi yang pada satu pihak menjalankan penghematan secara besar-besaran dan di pihak lain hendak mempertahankan pendapatan ekspor terutama yang diperoleh dari hasil perkebunan, padahal nilai *gulden* yang dipertahankan mau tak mau mengurangi daya beli negara-negara pengimpor.

Krisis Ekonomi tersebut mempengaruhi kondisi politik dan ekonomi di Indonesia. Tidak berfungsinya perbankan, pabrik-pabrik atau industry menyebabkan terjadinya pemecatan buruh besar-besaran. Dampaknya pengangguran besar-besaran pun terjadi dan eksploitasi pemerintah terhadap kolonial belanda semakin memberatkan. hal ini memicu kaum pergerakan semakin intensif melakukan koordinasi.

Pada masa awal tahun 1930-an pergerakan kebangsaan Indonesia mengalami masa krisis. Keadaan seperti itu disebabkan beberapa hal. Pertama, akibat krisis ekonomi

atau malaise yang melanda dunia. Kedua, diterapkannya pembatasan hak berkumpul dan berserikat yang dilakukan pengawasan ekstra ketat oleh polisi-polisi Hindia Belanda yang diberi hak menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh partai politik. Ketiga, tanpa melalui proses terlebih dahulu Gubernur Jenderal dapat menyatakan suatu organisasi pergerakan atau kegiatan yang dilakukannya bertentangan dengan law and order.

Hal diatas menjadi semakin parah ketika Hindia Belanda diperintah Gubernur Jenderal yang konservatif dan reaksioner yaitu de Jonge (1931-1936). . Periode awal 1932 sampai dengan pertengahan 1933 tidak hanya ditandai oleh perpecahan gerakan nasionalis serta kegagalan usaha pengintegrasian organisasi-organisasi nasionalis, tetapi juga oleh aksi politik yang semakin meningkat terutama sebagai dampak politik agitasi yang dijalankan oleh Soekarno. Maka dari itulah gerak-gerik Partindo dan PNI Baru senantiasa diawasi secara ketat.

Pemerintah Hindia Belanda tidak bersedia memulihkan hak politik bagi pergerakan nasional di Indonesia. Tetapi Hindia Belanda masih membiarkan organisasi pergerakan yang moderat untuk hidup. Hal itu juga disebabkan beberapa hal seperti menjamin demokrasi yang makin tumbuh pasca Perang Dunia I, keamanan yang diciptakan organisasi itu, dan sebab-sebab lainnya yang dianggap tidak merugikan pihak Hindia Belanda.

Pemerintah Belanda tidak hendak mematikan pergerakan di Indonesia. Mereka tahu bahwa perasaan rakyat yang tidak tersalurkan karena dibungkam oleh pemerintah akan mencari jalan lain yang dapat menimbulkan gerakan-gerakan eksplosif yang tidak diinginkan. Pemerintah Hindia Belanda hanya hendak melemahkan aktivitas pergerakan yang bersifat radikal-revolusioner. Yang diharapkan oleh pemerintah kolonial

adalah semacam nasionalisme yang lunak dan kompromis, yang dapat digunakan sebagai alat untuk membendung perasaan rakyat yang membara dan menyalurkan ke arah pergerakan yang tidak membahayakan kedudukan pemerintah Hindia Belanda.

Politik Tangan Besi de Jonge

Perkembangan politik yang ada semakin diperburuk dengan pergantian Gubernur Jenderal de Graff yang masa jabatannya telah berakhir pada tahun 1931 dan digantikan oleh Jonkheer Mr. B.C.D de Jonge, seorang konservatif tulen yang amat memusuhi dunia pergerakan. Ia seorang yang tidak punya waktu mendengarkan kritik dari kaum pergerakan dan menganggap semua ocehan kaum pergerakan sebagai agitasi yang harus segera dibungkam. Pergantian ini merupakan garis pemisah antara dua zaman politik kolonial Belanda di Indonesia dalam empat puluh tahun terakhir dari kekuasaan mereka. Perbedaan prinsipnya adalah etis dan non-etis.

Tujuan utama dari politik kolonial sejak tahun 1931 adalah mempertahankan dengan segala upaya *Rust en Orde* (Tata tenteram) yang berarti jangan sampai ada perubahan didalam masyarakat dan terutama tidak melancarkan *reforms*, malahan sebaliknya prinsip kebijaksanaan yang diambil adalah kembali mengokohkan sendi-sendi tradisional dan daerah Indonesia.

Pada masa awal tahun 1930-an pergerakan kebangsaan Indonesia mengalami masa krisis. Keadaan seperti itu disebabkan beberapa hal. *Pertama*, akibat krisis ekonomi atau malaise yang melanda dunia, memaksa Hindia Belanda untuk bertindak reaksioner dengan tujuan menjaga ketertiban dan keamanan. Dalam rangka kebijakan itu, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan beberapa pasal karet dan *exorbitante rechten* secara lebih efektif. *Kedua*, diterapkannya

pembatasan hak berkumpul dan berserikat yang dilakukan pengawasan ekstra ketat oleh polisi-polisi Hindia Belanda yang diberi hak menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh partai politik. Selain itu juga dilakukan pelarangan bagi pegawai pemerintah untuk menjadi anggota partai politik. *Ketiga*, tanpa melalui proses terlebih dahulu Gubernur Jenderal dapat menyatakan suatu organisasi pergerakan atau kegiatan yang dilakukannya bertentangan dengan law and order sesuai dengan Koninklijk Besluit tanggal 1 September 1919. Peraturan itu merupakan modifikasi dari pasal 111 R.R. (Regering Reglement). *Keempat*, banyak tokoh pergerakan kebangsaan di Indonesia yang diasingkan, seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir.

Gubernur Jenderal de Jonge tidak mengakui eksistensi pergerakan nasional, sehingga tindakannya selalu mencurigai organisasi-organisasi pergerakan nasional. Beberapa peraturan mengenai larangan berkumpul dan berapat, hukuman bagi pegawai yang menggabungkan diri pada kegiatan 'ekstrimistis', dan hak-hak yang membuang dan menginternir kaum nasionalis radikal, selaras dengan politik kekerasan menunjukkan kurang pengertian akan nasionalisme Indonesia. Namun, dasarnya memang pihak lain, terutama kepentingan kaum pengusaha, perlu dibela dan dipertahankan selama masa krisis itu. Peningkatan Pergerakan Nasional menjadi dasar politik penindasan de Jonge. Selama pemerintahannya banyak diterapkan hak-hak *exorbitant* dengan menginternir Ir. Soekarno ke Flores dan kemudian ke Bengkulu, serta Drs. Moh. Hatta dan Sjahrir ke Digul Atas dan kemudian ke Banda.

Ditambah lagi berpuluh-puluh orang yang dibuang karena terlibat pemberontakan tahun 1926 dan 1927 serta aktivis radikal pada tahun-tahun berikutnya ke Digul Atas atau

Tanah Merah. Kecuali kaum komunis juga anggota partai nasional radikal seperti, PNI, Partindo, dan Permi dibuang kesana. Alat represif yang sangat efisien dari pemerintah colonial Belanda adalah PID, yaitu polisi yang ditugaskan untuk mengawasi gerakan-gerakan nasional, disebar dan diberi kuasa untuk menghadiri setiap rapat baik yang bersifat politik maupun tidak. Dan diberi wewenang untuk menghentikan pembicara yang mengecam politik pemerintah, membubarkan rapat dan menangkap peserta yang dicurigai. PID adalah singkatan dari *Politiek Inlichtingen Dienst* semacam badan penyelidikan. Polisi-polisi PID ini merupakan momok bagi gerakan nasional Indonesia dan merupakan alat colonial yang ampuh untuk melumpuhkan gerakan nasional. Demikianlah pergerakan nasional tampak mengalami kelumpuhan gerak. Sedangkan dibidang ekonomi dia selalu berusaha untuk meningkatkan perusahaan-perusahaan serta menghemat pengeluaran negara, sebagian akibat depresi ekonomi tahun 1930. Pendidikan bagi golongan pribumi semakin dibatasi, antara lain dengan dikeluarkannya Ordonansi Pengawasan (*Toezicht Ordonantie*) pada tahun 1932. Dengan Ordonansi ini segala penyelenggaraan pengajaran yang mengancam ketertiban masyarakat dilarang. Dalam hal ini sekolah-sekolah diselenggarakan oleh Ki Hadjar Dewantara diawasi dengan sangat ketat. Keresahan politik, pergolakan dan pemberontrakan tampak merupakan gejala yang timbul sebagai reaksi terhadap politik reaksioner de Jonge. Ordonansi sekolah liar yang diberlakukan pemerintah kolonial membuat aktivis-aktivis pergerakan 1930an menghindari politik massa yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban umum. Kaum terpelajar bumi putera dengan ordonansi itu dibatasi ruang geraknya untuk berkumpul dengan penduduk pribumi. Sementara itu, kata “politik” menjadi momok bagi penduduk bumi putera. Persoalan

“politik” menjadi urusan polisi kolonial, erat kaitannya dengan *rust en orde*.

Pemerintah Hindia Belanda tidak bersedia memulihkan hak politik bagi pergerakan nasional di Indonesia. Tetapi Hindia Belanda masih membiarkan organisasi pergerakan yang moderat untuk hidup. Hal itu juga disebabkan beberapa hal seperti menjamin demokrasi yang makin tumbuh pasca Perang Dunia I, keamanan yang diciptakan organisasi itu, dan sebab-sebab lainnya yang dianggap tidak merugikan pihak Hindia Belanda. Pemerintah Belanda tidak hendak mematikan pergerakan di Indonesia. Mereka tahu bahwa perasaan rakyat yang tidak tersalurkan karena dibungkam oleh pemerintah akan mencari jalan lain yang dapat menimbulkan gerakan-gerakan eksplosif yang tidak diinginkan. Pemerintah Hindia Belanda hanya hendak melemahkan aktivitas pergerakan yang bersifat radikal-revolusioner. Yang diharapkan oleh pemerintah kolonial adalah semacam nasionalisme yang lunak dan kompromis, yang dapat digunakan sebagai alat untuk membendung perasaan rakyat yang membara dan menyalurkan ke arah pergerakan yang tidak membahayakan kedudukan pemerintah Hindia Belanda.

Akibat tindakan-tindakan pemerintah kolonial Hindia Belanda seperti itu, pergerakan kebangsaan yang ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya harus dapat menyesuaikan diri dengan peraturan atau kebijaksanaan Pemerintah Kolonial. Organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan yang ada terpaksa mengurangi sikap radikal-revolusioner dan non-kooperatifnya terhadap pemerintah. Itulah yang sering dikatakan bahwa organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia sesudah tahun 1930 umumnya bersifat lunak dan moderat.

Karena tidak mampu lagi menghadapi politik tangan besi de Jonge, organisasi-

organisasi pergerakan nasional pun yang awalnya nonkooperatif memilih bersikap kooperatif dengan mendekati kaum nasionalis dengan pemerintah kolonial. Kesadaran itu mulai muncul ketika Perhimpunan Indonesia mulai mengambil haluan kooperasi.

Sementara itu suasana politik dunia semakin tegang, tambahan pula Jepang dengan pemerintahan militernya menjalankan pula politik ekspansionisme di daerah pasifik. Baik di negeri Belanda maupun di Indonesia kaum nasionalis menyadari bahwa dalam menghadapi fasisme tidak ada alternatif lain daripada memihak demokrasi. Maka dari itu perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme tidak lagi dilakukan secara mutlak bersikap anti. Ada kebersamaan yang mendekati kaum nasionalis dengan penguasa kolonial, yaitu mempertahankan demokrasi terhadap bahaya fasisme. Kesadaran itu muncul lebih dahulu di kalangan Perhimpunan Indonesia yang mulai melakukan haluan kooperasi. Pergerakan nasional yang berada di Indonesia juga mulai bersikap kooperatif.

Sejak tahun-tahun 1930-an peranan lembaga politik kolonial (Volksraad) makin meningkat. Lembaga itulah yang satu-satunya alat yang dibenarkan pemerintah kolonial untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan pelbagai golongan. Sebab itu suara yang muncul dalam Volksraad yang berasal dari golongan kooperatif itu sangat penting untuk mengetahui pemikiran-pemikiran bangsa Indonesia sejak sekitar tahun 1930 sampai 1942. Dalam masa dari tahun 1935 sampai 1942, partai-partai politik bangsa Indonesia menjalankan taktik-taktik parlementer yang moderat.

Organisasi-organisasi nonpolitik dan partai-partai yang bersedia bekerjasama dan setuju punya wakil dalam dewan-dewan ciptaan Belanda yang terjamin mendapat

sedikit kekebalan dari gangguan pengawasan polisi. Dan satu-satunya forum yang secara relatif bebas menyatakan pendapat politik adalah dewan perwakilan ciptaan pemerintah kolonial Belanda itu. Dengan demikian, satu-satunya cara bagi gerakan nasionalis untuk mengusahakan perubahan ialah dengan jalan mempengaruhi pemerintah kolonial Belanda secara langsung melalui dewan tersebut, tidak dengan mengatur dukungan massa.

Tokoh-tokoh pergerakan mulai memunculkan ide tentang pembentukan Fraksi Nasional di dalam Volksraad. Akhirnya fraksi ini dapat didirikan tanggal 27 Januari 1930 di Jakarta beranggotakan 10 orang yang berasal dari daerah Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. 1. Petisi Soetardjo

Gagasan dari petisi ini dicetuskan oleh Sutardjo Kartohadikusumo, Ketua Persatuan Pegawai *Bestuur*/ Pamongpraja Bumiputera dan wakil dari organisasi ini di dalam sidang Volksraad pada bulan Juli 1936. Belanda. Isi petisi itu secara garis besar adalah tentang permohonan supaya diadakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Negeri Belanda di mana anggota-anggotanya mempunyai hak yang sama. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana yang isinya adalah pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri dalam batas pasal 1 Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda. Petisi itu ada yang menyetujui dan ada yang tidak. Kalau dari pihak Indonesia ada yang tidak setuju, maka alasannya bukanlah soal isi petisi itu tetapi seperti yang diajukan oleh Gesti Noer ialah caranya mengajukan seperti menengadahkan tangan. Antara tokoh-tokoh Indonesia terjadi pro-kontra tentang petisi itu. Tetapi akhirnya petisi Soetardjo ditolak oleh Ratu Belanda pada bulan November 1938. 2. Gabungan Politik Indonesia (GAPI)

Meskipun akhirnya Petisi Soetardjo itu ditolak, petisi itu ternyata mempunyai

pengaruh juga yaitu membantu membangkitkan gerakan nasionalis dari sikap mengalah yang apatis yang telah menyimpannya sejak gerakan nonkooperasi dilumpuhkan. Suatu gagasan untuk membina kerjasama diantara partai-partai politik dalam bentuk federasi timbul kembali pada tahun 1939.

Pada tanggal 21 Mei 1939 di dalam rapat pendirian konsentrasi nasional di Jakarta berhasil didirikan suatu organisasi yang merupakan kerjasama partai-partai politik dan organisasi-organisasi dengan diberi nama *Gabungan Politik Indonesia* (GAPI). Tujuan GAPI adalah memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri dan persatuan nasional. Kemudian tujuan itu dirumuskan dalam semboyan "Indonesia Berparlemen". Sikap kurang menentukan kemerdekaan itu disebabkan adanya keprihatinan atas kemungkinan meletusnya Perang Pasifik. GAPI melakukan berbagai kampanye yang bertujuan menarik simpati rakyat untuk mendukung perjuangannya di dalam ketatanegaraan. Pada tanggal 14 September 1940 dibentuklah komisi untuk menyelidiki dan mempelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan (*Commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke*). Komisi ini diketuai oleh Dr. F.H Visman, selanjutnya dikenal dengan nama Komisi Visman. Pada awal pembentukannya, kalangan pergerakan mempertanyakan keberadaan kegunaan komisi itu. Akhirnya Komisi Visman menghasilkan laporan yang cukup tebal tentang berbagai tuntutan dan harapan-harapan rakyat Indonesia. Laporan itu terbit pada tahun 1942 hanya beberapa minggu sebelum kedatangan tentara Jepang ke Indonesia, sehingga laporan tersebut tidak jelas nasibnya.

Aktivitas Kaum Pergerakan

Akibat tindakan-tindakan pemerintah kolonial Hindia Belanda seperti itu, pergerakan kebangsaan yang ingin

mempertahankan kelangsungan hidupnya harus dapat menyesuaikan diri dengan peraturan atau kebijaksanaan Pemerintah Kolonial. Organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan yang ada terpaksa mengurangi sikap radikal-revolusioner dan non-kooperatifnya terhadap pemerintah. Itulah yang sering dikatakan bahwa organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia sesudah tahun 1930 umumnya bersifat lunak dan moderat. Karena tidak mampu lagi menghadapi politik tangan besi de Jonge, organisasi-organisasi pergerakan nasional pun yang awalnya nonkooperatif memilih bersikap kooperatif dengan mendekati kaum nasionalis dengan pemerintah kolonial. Kesadaran itu mulai muncul ketika Perhimpunan Indonesia mulai mengambil haluan kooperasi.

Sementara itu suasana politik dunia semakin tegang, tambahan pula Jepang dengan pemerintahan militernya menjalankan pula politik ekspansionisme di daerah pasifik. Baik di negeri Belanda maupun di Indonesia kaum nasionalis menyadari bahwa dalam menghadapi fasisme tidak ada alternatif lain daripada memihak demokrasi. Maka dari itu perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme tidak lagi dilakukan secara mutlak bersikap anti. Ada kebersamaan yang mendekati kaum nasionalis dengan penguasa kolonial, yaitu mempertahankan demokrasi terhadap bahaya fasisme. Kesadaran itu muncul lebih dahulu di kalangan Perhimpunan Indonesia yang mulai melakukan haluan kooperasi. Pergerakan nasional yang berada di Indonesia juga mulai bersikap kooperatif.

Sejak tahun-tahun 1930-an peranan lembaga politik kolonial (*Volksraad*) makin meningkat. Lembaga itulah yang satu-satunya alat yang dibenarkan pemerintah kolonial untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan pelbagai golongan. Sebab itu suara yang

muncul dalam volksraad yang berasal dari golongan kooperatif itu sangat penting untuk mengetahui pemikiran-pemikiran bangsa Indonesia sejak sekitar tahun 1930 sampai 1942. Dalam masa dari tahun 1935 sampai 1942, partai-partai politik bangsa Indonesia menjalankan taktik-taktik parlementer yang moderat. Hanya organisasi-organisasi nonpolitik dan partai-partai yang bersedia bekerjasama dan setuju punya wakil dalam dewan-dewan ciptaan Belanda yang terjamin mendapat sedikit kekebalan dari gangguan pengawasan polisi. Dan satu-satunya forum yang secara relatif bebas menyatakan pendapat politik adalah dewan perwakilan ciptaan pemerintah kolonial Belanda itu. Dengan demikian, satu-satunya cara bagi gerakan nasionalis untuk mengusahakan perubahan ialah dengan jalan mempengaruhi pemerintah kolonial Belanda secara langsung melalui dewan tersebut, tidak dengan mengatur dukungan massa.

Tokoh-tokoh pergerakan mulai memunculkan ide tentang pembentukan Fraksi Nasional di dalam volksraad. Akhirnya fraksi ini dapat didirikan tanggal 27 Januari 1930 di Jakarta beranggotakan 10 orang yang berasal dari daerah Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Dalam kondisi seperti ini muncul petisi Soetardjo. Gagasan dari petisi ini dicetuskan oleh Sutardjo Kartohadikusumo, Ketua Persatuan Pegawai *Bestuur*/ Pamongpraja Bumiputera dan wakil dari organisasi ini di dalam sidang Volksraad pada bulan Juli 1936. Belanda. Isi petisi itu secara garis besar adalah tentang permohonan supaya diadakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Negeri Belanda di mana anggota-anggotanya mempunyai hak yang sama. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana yang isinya adalah pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri dalam batas pasal 1 Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda. Petisi itu ada yang menyetujui dan

ada yang tidak. Kalau dari pihak Indonesia ada yang tidak setuju, maka alasannya bukanlah soal isi petisi itu tetapi seperti yang diajukan oleh Gesti Noer ialah caranya mengajukan seperti menengadahkan tangan. Antara tokoh-tokoh Indonesia terjadi pro-kontra tentang petisi itu. Tetapi akhirnya petisi Soetardjo ditolak oleh Ratu Belanda pada bulan November 1938.

Meskipun akhirnya Petisi Soetardjo itu ditolak, petisi itu ternyata mempunyai pengaruh juga yaitu membantu membangkitkan gerakan nasionalis dari sikap mengalah yang apatis yang telah menyimpannya sejak gerakan nonkooperasi dilumpuhkan. Suatu gagasan untuk membina kerjasama diantara partai-partai politik dalam bentuk federasi timbul kembali pada tahun 1939. Pada tanggal 21 Mei 1939 di dalam rapat pendirian konsentrasi nasional di Jakarta berhasil didirikan suatu organisasi yang merupakan kerjasama partai-partai politik dan organisasi-organisasi dengan diberi nama *Gabungan Politik Indonesia* (GAPI).

Tujuan GAPI adalah memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri dan persatuan nasional. Kemudian tujuan itu dirumuskan dalam semboyan "Indonesia Berparlemen". Sikap kurang menentukan kemerdekaan itu disebabkan adanya keprihatinan atas kemungkinan meletusnya Perang Pasifik. GAPI melakukan berbagai kampanye yang bertujuan menarik simpati rakyat untuk mendukung perjuangannya di dalam ketatanegaraan. Pada tanggal 14 September 1940 dibentuklah komisi untuk menyelidiki dan mempelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan (*Commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke*). Komisi ini diketuai oleh Dr. F.H. Visman, selanjutnya dikenal dengan nama Komisi Visman. Pada awal pembentukannya, kalangan pergerakan mempertanyakan keberadaan kegunaan

komisi itu. Akhirnya Komisi Visman menghasilkan laporan yang cukup tebal tentang berbagai tuntutan dan harapan-harapan rakyat Indonesia. Laporan itu terbit pada tahun 1942 hanya beberapa minggu sebelum kedatangan tentara Jepang ke Indonesia, sehingga laporan tersebut tidak jelas nasibnya.

Keadaan Pangan, Pendapatan Keuangan dan Keadaan Ekonomi Rakyat.

Produksi Pangan

Pada tahun 1931 dimulai penyusutan areal tanaman tebu. Hal itu tidak saja tampak pada luas areal sawah yang dipanen, akan tetapi juga pada kenaikan luas tanaman jagung dan kedelai. Persediaan jumlah pangan untuk tahun 1935, kalau penambahan penduduk antara tahun 1927 dan 1935 diperkirakan 10%, dan secara relative terdapat kenaikan pada umbi-umbian. Peningkatan yang besar dari penanaman umbi-umbian sebagian merupakan reaksi normal terhadap tahun panen yang buruk (1943). Hal yang penting lagi ialah perkembangan jumlah pangan yang tersedia selama musim kurang pangan, yaitu apa yang disebut pakeklik. Lama masa pakeklik ditetapkan, sedapat mungkin sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Data mengenai kemungkinan beras terdapat dalam setiap masa pakeklik 1932/1933 dan 1935/1936.

Saldo ekspor kelapa dan hasil-hasil kelapa untuk Jawa dan Madura sejak dulu telah berubah menjadi saldo impor. Tambahan pangan yang berasal dari impor atau karena pembatalan ekspor mempengaruhi persediaan pangan lainnya, seperti kebutuhan-kebutuhan yang nharus dibayar dari pemasukkan sendiri. Jumlah relatif yang sama disbanding dengan produksi seluruhnya dapat menjurus ke arah kekurangan pangan untuk banyak orang. Kalau musim pakeklik panjangnya lebih dari

biasa, berarti kebutuhan pangan lebih ekstra dari jumlah tahunan.

Politik dalam distribusi umum

Jumlah pangan yang tersedia di Jawa dan Madura tahun 1935, kira-kira dapat menutup kebutuhan tahunan kalau itu masih dapat ditambah dengan beberapa impor. Walaupun Jawa dan Madura lebih berswasembada pangan, masalah distribusi untuk persediaan tersebut tidak kurang pentingnya, kendatipun bantuan impor yang diperlukan sangat berkurang. Penambahan kekurangan setempat dan per daerah produksi tertentu di Jawa sendiri, yaitu di daerah yang mengalami surplus, terutama karena dihapusnya sebagian besar industri tebu. Dengan demikian, distribusi pangan sebagian diatur melalui saluran-saluran lain, sedangkan pembelian dan pengelolaan kelebihan produksi padi, jagung dan kedelai mendapat arti yang besar dalam ekonomi pertanian daerah-daerah tertentu.

Stabilisasi harga

Untuk Jawa pemerintah memandang perlu mengadakan pembelian dan impor beras agar dapat menjamin perkembangan harga yang sedapatnya merata. Jumlah yang dibeli. Berjumlah 114.525 ton tahun 1943/1935 dan 5.000 ton pada tahun 1935/1936. Dalam beberapa kasus, pemerintah bertindak langsung membiayai sebagian pembelian atau mengambil alih padi yang disediakan untuk pembayaran pajak tanam dengan harga pantas. Dengan peraturan impor beras telah diperoleh stabilisasi tingkat harga padi. Suatu batas yang layak bagi pabrik penggilingan padi dan pedagang beras serta untuk penyebaran yang baik dan mobilitas persediaan beras.

Kekurangan pangan dan penanggulangannya

Sebagian rakyat yang sedikit banyak tergantung kepada penghasilan uang, telah

semakin miskin, sehingga pada bulan-bulan tertentu atau terkadang malah sepanjang tahun, tidak mampu membeli bahan pangan yang lebih baik. Daerah yang mengalami kesulitan seperti terdapat di kabupaten Bogor, Indramayu, Cirebon, Tegal, Banyumas, Cilacap, Bojonegoro, Jombang, Madiun utara serta Kediri Selatan dan Madura mengalami kekurangan besar. Untuk memberantas keadaan seperti itu, pengusaha setempat dan pemerintah pusat selalu menyediakan uang dan kesempatan kerja serta memberi bantuan yang lebih langsung dengan menyediakan pangan murah.

Keadaan pangan dan kesehatan

Angka kematian seluruh Jawa tahun 1934 rata-rata naik 2% dan ini dapat disebut meresahkan karena angka kematian sejak 1930 tiap tahun menurun. Hal ini ditunjuk sebagai akibat keadaan ekonomi yang tidak begitu baik dan telah menyebabkan daya tahan penduduk terhadap penyakit menjadi berkurang. Beberapa unsur dan gejala keadaan ekonomi:

1. Peredaran uang
2. Perubahan pendapatan uang rakyat pada 1935 dibanding dengan 1939
3. Pajak tanah, bank rakyat, rumah gadai di Jawa dan Madura
4. Impor
5. Kesempatan kerja
6. Upah dan pendapatan sampingan
7. Aneka persoalan

Simpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa : (1). Faktor-faktor yang mendasari terjadinya depresi ekonomi pada masa-masa terakhir

Hindia Belanda dapat dilihat pada saat krisis ekonomi dunia (*Malaise*) begitu keras menghantam Hindia Belanda karena pada saat itu ekonomi Hindia-Belanda sangat bergantung kepada ekspor, khususnya kepada pasar Eropa. Maka, ketika pasar Eropa merosot, maka industri di Hindia-Belanda juga turut merosot. Harga barang ekspor menurun tajam.

(2). Hubungan antara depresi ekonomi dengan semangat pergerakan Nasional terletak pada kebijakan dan sikap Gubernur Jenderal de Jonge merupakan orang yang sangat konservatif dan sangat memusuhi kaum pergerakan, menurutnya kaum pergerakan harus dibungkam. Hingga aktivitas pergerakan nasional dilumpuhkan pada masa itu. Namun dengan begitu, dapat dianalisis upaya yang dilakukan Pemerintah Kolonial adalah untuk mencegah sebuah pemberontakan, atau mungkin revolusi pada saat krisis melanda, maka de Jonge mengambil "sikap keras" terhadap kaum pergerakan. Ia memberlakukan hukum yang sangat keras bagi pergerakan Indonesia. Dia memberlakukan pengawasan ketat terhadap rapat-rapat umum, melakukan penangkapan dan pemenjaraan terhadap sejumlah aktivis, hingga melarang kegiatan pers. Semua itu untuk mencegah bersatunya kaum pergerakan dengan keresahan rakyat akibat krisis ekonomi. Karena tidak mampu lagi menghadapi politik tangan besi de Jonge, organisasi-organisasi pergerakan nasional pun yang awalnya nonkooperatif memilih bersikap kooperatif dengan mendekati kaum nasionalis dengan pemerintah kolonial.

(3). Dampak depresi ekonomi terhadap masyarakat Hindia Belanda 1930- 1942 adalah ketika terjadi krisis ekonomi para tokoh pergerakan nasional Indonesia, seperti salah satunya yakni Soetadjo mengajukan petisi tentang permohonan supaya diadakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan

Negeri Belanda di mana anggota-anggotanya mempunyai hak yang sama. Meski petisi ini ditolak, namun memiliki pengaruh untuk membangkitkan gerakan nasionalis untuk. hingga kemudian GAPI (Gabungan Politik Indonesia) mengusung “Indonesia berparlemen” dan di setujui oleh Belanda karena GAPI mengajak rakyat Indonesia dan Negeri Belanda untuk bekerjasama menghadapi fasisme. Karena suasana politik dunia pada masa itu semakin tegang, tambahan pula Jepang dengan pemerintahan militernya menjalankan pula politik ekspansionisme di daerah pasifik. Baik di negeri Belanda maupun di Indonesia kaum nasionalis menyadari bahwa dalam menghadapi fasisme tidak ada alternatif lain daripada memihak demokrasi. Dampak lain dari depresi ekonomi tersebut adalah terjadinya pertentangan kepentingan menyebabkan kondisi hidup rakyat terbelakang, karena cara-cara produksi lama tidak mampu menghadapi kapitalisme kolonial yang mempunyai organisasi dan teknologi modern yang mampu mengubah keadaan ekonomi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, S. (1986). “Taman Siswa dan Wilde Scholen” dalam Peter Carey dan Colin Wild (ed.). *Gelora Api Revolusi*. Jakarta: Gramedia
- Anthony, G. (1984). *The Constitution of Society*, Cambridge, Press Politik
- Bernhard, D. (1987).. *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: LP3ES
- Christopher, L. (1993). *The Structures of History*, London, Basil Blackwell
- Djojohadikusumo, S. *Kredit Rakyat di Masa Depresi* .Jakarta: LP3ES
- G. Moedjanto, MA. (1992). *Indonesia Abad ke-20 Jilid I*. Yogyakarta: Kanisius
- H. Ismaun. (2005). *Pengantar Belajar Sejarah Sebagai Ilmu dan Wahana Pendidikan*, Bandung, Historia Utama Press-Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia
- John, I. (1987). *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan,* ". Jakarta: LP3ES
- Kartodidjo, S. (1992). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid 2*, Jakarta, Penerbit Pt Gramedia Pustaka Utama
- Kartodirdjo, S. (1990). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme.(Jilid II)*. Jakarta: Gramedia
- Marc, B, (1988). *Pleidooi voor de Geschiedenis of Geschiedenis Als Ambacht*, Nijmegen, Nederlandse Vertaling, SUN
- Marwati, D. P. & Nugroho N,. (1993). *Sejarah Nasional Indonesia*. V,Jakarta, Depdikbud bekerjasama dengan Balai Pustaka
- Muljana, S. (2008). *Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan (Jilid I)*. Yogyakarta: LKIS
- Notosusanto, N. & Poesponegoro, M, D. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Balai Pustaka

- Nugroho, N. & Marwati, D. P.,. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*. Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- R, Z, Leirissa. (1999). *Pedoman Penyusunan Proposal Untuk Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Sejarah*. Depok, PS Ilmu Sejarah, PPs UI
- R, Z. Leirissa. (1997) *Metodologi Strukturis, Pengantar*. Depok , PS Ilmu Sejarah PPs UI.
- Susanto, T S.H. (1989). *Sejarah Pergerakan Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat
- Susanto, T, S.H. (1989). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Jakarta. Pembangunan.
- Wangsa, W. (1986). *Autobiografi I. Wangsa Widjaya Selaku Perintis Kemerdeka*. Jakarta: Proyek Pembinaan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan.